

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.2 Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah diterapkan serta dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan metode analisis *Relative Importance Index (RII)*, yang didasari jawaban atas kuesioner penyedia jasa yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) responden bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Lelang Ulang Pada Proyek Pekerjaan di Lingkungan Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Responden Penyedia Jasa yang menempati peringkat 10 (sepuluh) teratas adalah (1) Tidak tercapainya kesepakatan pada tahap klarifikasi dan negosiasi, (2) Kegagalan sistem dalam mengenskripsi dokumen penawaran, (3) Terindikasi adanya penawaran yang tidak kompetitif, (4) Adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terbukti benar dan dapat diterima, (5) Tidak memadainya komputerisasi yang dimiliki oleh peserta, (6) Terjadinya praktek pengkondisian persyaratan pada satu pihak yang melibatkan POKJA/PPK, (7) Dokumen penawaran penyedia tidak menjelaskan pekerjaan, (8) Tidak dapat membuktikan keaslian dokumen kualifikasi, (9) Terindikasi adanya kolusi antar penyedia dan (10) Terindikasi adanya praktek monopoli.
2. Berdasarkan responden pengguna jasa diperoleh 10 (sepuluh) peringkat teratas yang paling dominan sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Lelang Ulang Pada

Proyek Pekerjaan di Lingkungan Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri atas (1) Tidak tercapainya kesepakatan pada tahap klarifikasi dan negosiasi, (2) Terindikasi adanya penawaran yang tidak kompetitif, (3) Dokumen penawaran yang disampaikan peserta tidak lengkap, (4) Dokumen penawaran penyedia tidak menjelaskan pekerjaan, (5) Kegagalan sistem dalam mengenskripsi dokumen penawaran, (6) Terindikasi adanya kolusi antar penyedia, (7) Tidak dapat membuktikan keaslian dokumen kualifikasi, (8) Tidak memadainya komputerisasi yang dimiliki oleh peserta, (9) SDM penyedia tidak memahami penggunaan SPSE dan peringkat (10) Terjadinya praktek pengkondisian persyaratan pada satu pihak yang melibatkan POKJA/PPK.

3. Berdasarkan perbandingan 5 (lima) peringkat teratas dari faktor Penyebab Terjadinya Lelang Ulang Pada Proyek Pekerjaan di Lingkungan Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperoleh 5 (lima) Peringkat teratas yaitu (1) Tidak tercapainya kesepakatan pada tahap klarifikasi dan negosiasi, peringkat pertama ini sama pada tiga yang dibandingkan antara responden penyedia, responden pengguna dan gabungan antara pengguna dan penyedia, pada peringkat (2) Reponden pengguna “terindikasi adanya penawaran yang tidak kompetitif “, hal ini sama terjadi pada peringkat kedua hasil RII responden gabungan antara Pengguna dan Penyedia Jasa , pada responden penyedia jasa yang menempati peringkat 2 (dua) adalah Kegagalan sistem dalam mengenskripsi dokumen penawaran, Peringkat (3) ketiga hasil RII pada responden pengguna jasa adalah dokumen penawaran yang disampaikan peserta tidak lengkap, sedangkan peringkat (3)

tiga pada responden penyedia jasa adalah Terindikasi adanya penawaran yang tidak kompetitif dan peringkat responden gabungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa adalah Kegagalan sistem dalam mengenskripsi dokumen penawaran, Peringkat (4) empat faktor penyebab terjadinya lelang ulang pada responden pengguna jasa adalah Dokumen penawaran penyedia tidak menjelaskan pekerjaan, berbeda yang diperoleh pada responden penyedia jasa peringkat (4) empat ditempati “Adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terbukti benar dan dapat diterima” dan peringkat ke (4) empat pada responden gabungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa adalah Tidak memadainya komputerisasi yang dimiliki oleh peserta, pada peringkat 5 (lima) faktor penyebab lelang berdasarkan responden pengguna jasa adalah Kegagalan sistem dalam mengenskripsi dokumen penawaran, pada responden penyedia jasa yang menempati peringkat (5) kelima sebagai faktor penyebab lelang ulang pada proyek pekerjaan dilingkungan puslitbang kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah Tidak memadainya komputerisasi yang dimiliki oleh peserta, dan peringkat lima pada responden gabungan antara pengguna dan penyedia adalah Dokumen penawaran penyedia tidak menjelaskan pekerjaan.

4. Faktor dominan dengan peringkat tertinggi yaitu Tidak tercapainya kesepakatan pada tahap klarifikasi dan negosiasi, menjadi peringkat tertinggi dari pengolahan data responden pengguna jasa, penyedia jasa dan gabungan antara pengguna - penyedia jasa. menjadi sangat menarik karena faktor ini sangat dominan berdasarkan responden pengguna dan penyedia jasa dilingkungan Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, menjadi sangat penting karena tahapan klarifikasi – negosiasi menjadi tahapan lelang pengadaan barang/jasa yang tidak bisa dilewati oleh penyedia (calon pemenang lelang). yang menjadi perhatian karena negosiasi tidak pernah dianggap penting atau utama oleh para penyedia jasa. Negosiasi merupakan langkah awal sebelum memasuki fase kontraktual dan merupakan sarana bagi para pihak untuk melakukan pembicaraan atau perundingan untuk mencapai kata sepakat untuk saling tukar sesuatu yang diinginkan dengan pihak lain melalui proses tawar menawar, baik mengenai hal-hal pada saat situasi aktual, ketidaksepakatan maupun konflik yang berpotensi muncul dan berkembang ( Donald G. Gifford, 2004).

5. Dengan melihat faktor “Adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terbukti benar dan dapat diterima” sebagai salah satu peringkat tertinggi hasil pengolahan data responden penyedia dengan *RII* hal ini harus menjadi perhatian baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa dengan menempati salah satu peringkat teratas sudah barang tentu bahwa pengaduan dari berbagai elemen masyarakat akan mempengaruhi pada tahapan pelaksanaan pelelangan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dikemudian hari.

## **5.2 Saran**

untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai suatu kajian yang bersifat akademis penelitian ini dapat dilanjutkan ketingkat yang lebih detail dengan merinci berdasarkan jenis pelelangan, jenis paket pekerjaan, karakteristik pelelangan proyek seperti penawaran, jenis kontrak, ataupun pengalaman pekerjaan.

2. Untuk meningkatkan hasil analisis data maka jumlah sampel sebaiknya lebih banyak dan luas karena jumlah sampel akan sangat mempengaruhi hasil dari penelitian.
3. Menambah pengukuran lain yang mungkin mempengaruhi bagaimana lelang ulang dapat diminimalisir pada pelaksanaan pelelangan barang/jasa secara *e-procurement*, khususnya dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Berdasarkan hasil analisis *RII* yang diperoleh, pada variabel Persyaratan administrasi yang di minta tidak terpenuhi, menjadi faktor yang paling rendah peringkatnya, hasil pengolahan pada responden penyedia jasa menandakan bahwa untuk persyaratan administrasi yang disyaratkan penyedia jasa dapat memenuhi sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Fakta bahwa di instansi lain masih banyak ditemukan penyedia gagal dalam hal administrasi, faktor yang dapat diartikan sebagai bagian penting dalam evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia, bagian utama untuk penilaian penyedia maka meminimalisir kegagalan penyedia dalam hal persyaratan administrasi menjadi hal penting yang harus diusahakan. Penyedia memiliki kemampuan dan potensi untuk memberikan kontribusi dalam meminimalisir kegagalan dalam mengupayakan syarat administrasi yang ditentukan dalam dokumen lelang, meminimalisir potensi terjadinya lelang ulang karena gagal evaluasi administrasi. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan elaborasi terhadap variabel / faktor pada persyaratan administrasi yang di minta tidak terpenuhi, serta perlu dipastikan responden yang menjawab kuesioner benar-benar berada di level atas serta berpengalaman dan memahami

prosedur pelelangan barang/jasa pemerintah (seperti: manager proyek, pimpinan proyek) agar diperoleh hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin N., (2011), “*Optimalisasi Pengembangan E-Procurement pada Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan Satu Sampul dan Sistem Gugur*”, (Konsep dan Desain Pengembangan sebagai Fungsi Kontrol), Studi Kasus di Kementerian Pekerjaan Umum.
- Akhyuna I, (2009), “*Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Implementasi Sistem e-procurement*, Jurnal Siasat Bisnis, Jakarta.
- Anthony Klok dan Gerald S. Williams dalam Hutagalung .B, Wardani D.K dan Vidya .M, (2015), “ *Negosiasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya mencapai kesepakatan*”, Jurnal Privat Law, Edisi 07 Januari – Juni 2015.
- Anonim (2014), “*Kajian Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”. Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Arikunto, S, (2006), “*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Australian Government Information Management Office (AGIMO) (2000), “*Commonwealth Electronic Procurement, Implementation Strategy*”, Attorney-General’s Department, Canberra.
- Australian Government. Department of Finance and Administration (2005). “*Review of E-procurement Demonstration Project*”. Pada [www.agimo.gov.au](http://www.agimo.gov.au)
- Badan Pembinaan Konstruksi (2014), “*Unit Layanan Pengadaan (ULP)*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PERA).
- Bahagia S.N. (2006), “*Sistem Inventori*”, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung.
- Bahagia S. N. (2011), “*Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya*”, Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Pengadaan, LKPP.
- BPKP (2016), “*Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa Oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*”.
- Creswell W. dan John, (2009), “*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed(edisi ketiga)*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal 5.

- Darliansyah I., (2008), "*Identifikasi Faktor Dominan yang Berpengaruh pada Kegagalan Pemenang Tender dengan Pendekatan Risk Management*", Skripsi, Universitas Indonesia.
- Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (2017), "*Permasalahan Umum dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*", Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (2017), "*Kebijakan dan Penyiapan Lelang Awal*", Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan (2014), "*Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*", Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Disarikan dari Buku Prof. Sogar Simamora, *Op Cit.* Hal 100-154;
- Donald G. Gifford (2004), "*Legal Negotiation Theory and Applications*", Oxford University Press, London.
- Edquist, C., Hommen, L., and Tsipouri, L. (Eds.). (2000). "*Public Technology Procurement and Innovation., Boston/Dordrecht/London*", Kluwer Academic Publishers, Anonim;
- Flanagan, R., and Norman, G. (1993), "*Risk Management and Construction*", Wiley- Blackwell Science.
- Ferdian (2014), "*Kajian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*". Tesis, UNPAR.
- Frame, J Davidson. (2003), "*Managing Risk in Organizations, a guide for managers*", Jossey Bass. San Fransisco, USA.
- Gernot Muller dan Margarethe Rammerstorfer (2008), "*A theoretical analysis of procurement auctions for tertiary control in Germany*", Elsevier, Energy Policy 2620-2627.
- Hardjomuljadi, S. (2009), "*Strategi Pra Kontrak Untuk Mengurangi Dampak Klaim Konstruksi Pada Proyek Pusat Listrik Tenaga Air Di Indonesia*", Disertasi, Universitas Tarumanagara.
- Heryandi A., Afrianto I., dan Sufa'atin (2010), "*Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Arah E-Procurement*", UNIKOM.
- IN. R. Karyasa, IM. Alit K. Salain dan Mayun Nadiasa (2014), "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gagal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*



*secara Elektronik (e-procurement) di Kabupaten Badung*“, Volume 2 No.1, Jurnal Spektran.

Ippolito, Sarzana. (2003), “*Knowing Eprocurement. Information Sistems*”, Forensic Assosiation. Inc.

Kendrick, T. (2003), “Identifying and managing project risk”, *essential tools for failure- proofing your project*, American Management Association.

Kuncoro, dan Agus, (2013), “Langkah-langkah Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Primaprint*.

Kusumohamidjojo B., (1998), “*Dasar – dasar merancang kontrak*”, Grasindo, Jakarta.

KPPU (2009), Pasal 35 Huruf (f) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, “*Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*“, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KPPU (2009), Pedoman Pasal 22 penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. “*Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*“, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Laporan Hasil Kajian, (2015), “*Pengadaan Barang dan Jasa*”, Kedeputian, *Bidang Pencegahan*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LKPP (2011), “*Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*“ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), Jurnal Pengadaan Barang/Jasa.

LU JI dan TONG LI, (2008), “*MULTI-ROUND PROCUREMENT AUCTIONS WITH SECRET RESERVE PRICES: THEORY AND EVIDENCE*”, Journal Of Applied Econometrics, J. Appl. Econ. 23: 897–923.

Malik, Alfian. (2010), “*Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*”. Andi Offset, Yogyakarta.

Muslich dan Muhammad, (2007), “*Manajemen Resiko Operasional - Teori & Praktek*“, Sinar Grafika Offset, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Musa I, (2014), “*Bagaimana Seharusnya Mekanisme Penunjukan Langsung Ketika Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung Ulang Gagal*”, Jurnal Lingkar Widya Swara, Edisi I No. 2, p. 22-26.

Nasril, (2009), “*Kajian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pemerintah Berdasarkan Keppres 80/2003 (Studi Kasus Pada Pemda Kab. Pandeglang)*”, Tesis Jurusan Manajemen Proyek Konstruksi, Unpar, Bandung.

- Palmer .R (2003), “*Moving Procurement Systems to the Internet*” : the adoption and use of e-procurement technology models, *European Management Journal*.
- Panayiotou, N.A., Gayaialis, S.P., Tsiopoulos, I.P. (2004), “*An E-procurement system for governmental purchasing*”, *International Journal of Production Economics*, Vol. 90, Hal. 79–102.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, “*Matriks Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung / Gagal dan Tidak lanjutnya Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010*”, UPTB. LPSE Kota Samarinda.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tentang ULP mengenai Pelelangan / Pemilihan Langsung Gagal, Hal. 91
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tentang Pelaksanaan E-Tendering, Pasal 109, No.7.c, hal. 31.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kedua Tentang Tender/Seleksi Gagal Pasal 51, hal. 53-55.
- Project Management Institute, (2008), “*A Guide To The Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide)*”, Foerth Edition.
- Purwanto, Ibtu, et.al. (2008), “*E-Procurement Di Indonesia*”,. Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Purwanto E., dkk. (2012), “*ULP dan LPSE Pilar Reformasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*”, *Warta e-PROCUREMENT*, Edisi IV, Juli 2012, Jakarta.
- Raharjani J. (2005), “*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Pemilihan pasar swalayan sebagai tempat berbelanja di Kawasan Simpang Lima Semarang*”, *Jurnal Studi Manajemen* ISSN No.1693-8283 Vol.2 No.1, Universitas Diponegoro.
- Raharjani J dalam Liwe F. (2013), “*Kesadaran Merek, Keragaman Produk, dan Kualitas Produk Pengaruhnya Terhadap Pengambilan Keputusan*

*Konsumen Membeli di Kentucky Friedchicken Manado*”, Jurnal EMBA ISSN No. 2303-1174 Vol. 1 No.4,s Desember 2013, Hal. 2107-2116, Universitas Samratulangi, Manado.

Riduwan, (2010). *“Metode dan Teknik Menyusun Tesis”*, Alfabeta, Bandung.

Rikhi Toufan M.R., ST., (2014), *“MANUAL PROCEDURE”*, *Pelelangan Gagal dan Tidak Lanjut, Pelelangan Gagal, Unit Layanan Pengadaan (ULP)*, Universitas Brawijaya, Malang.

Simamora S. (2017), *“Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Hukum Kontrak, Laksbang Pressindo, Surabaya.

Siregar, S. (2010), *“Statistika Deskriptif untuk Penelitian dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17”*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siregar, S. (2013), *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Siswanto dan Rahayu. (2011), *“Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010”*. Jurnal. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan.

Soeharto, I. (1995), *“Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional”*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.

Sudjana, (1992), *“Metode Statistika”*, edisi kelima, Tarsito, Bandung.

Sugiyono, (2018), *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, Alfabeta, Bandung.

Supardi. (2013), *“Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supardi. (2013), *“Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif”*, Change Publication, Jakarta.

Sutiono dan Wibawa D.A, (2014), *“ Analisis Sistem Anti Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kementerian Keuangan Sebelum dan Setelah Penerapan e-procurement*, Kajian Akademis BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Teo., H, T.S., Hung, K. (2009), *“ Usage and Performance Impact of Electronic Procurement”*, Journal of Business Logistics.

Wibawa D.A (2015), "*Benarkah e-procurement Menjadikan Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Kompetitif*", Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.